





Oleh karena itu, dalam pemerintahan Islam tidak di perbolehkan adanya pemusatan kekuasaan atau cara-cara yang mengarah kesana.

Sehingga negara konstitusi menurut Islam, harus meletakkan prinsip persamaan di dalam hukum dan bersikap adil di dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum itu bagi semua warga negaranya, tanpa mengenal diskriminasi apapun baik kepada individu maupun golongan masyarakat.

2. Konsepsi siyasah Islam atas dominasi Golkar di dalam pemerintahan dan legislatif.

Sebagai konsekwensi logis atas kemenangannya di setiap pemilihan umum, GOLKAR merasa berhak mendominasi kekuasaan di eksekutif maupun di legislatif seperti yang sekarang terjadi. Padahal Islam sangat menghormati nilai-nilai asasi setiap manusia, yaitu; persamaan hak, kedudukan dan kesempatan sebagai pelaksana undang-undang, persamaan beramar ma'ruf nahi munkar, kesadaran akan tanggungjawab di hadapan-Nya, dan kesesuaian antara individu dan masyarakat serta negara dalam sasaran yang satu. Sehingga dominasi GOLKAR dengan alasan mayoritas, dalam pemerintahan maupun legislatif, tidak di benarkan dalam Islam, karena hal itu termasuk menghilangkan atau mematikan nilai-nilai asasi manusia.





tanggungjawab dalam tugas-tugas kemasyarakatan. Artinya, setiap muslim mendapatkan persamaan hak dalam semua aspek kehidupan, termasuk persamaan mendapatkan kedudukan di dalam lembaga pemerintahan maupun legislatif.

Sehingga adanya dominasi GOLKAR di dalam lembaga pemerintahan maupun di legislatif, sangat bertentangan dengan Islam. Sebab Islam tidak mengenal adanya superioritas satu kelompok atas kelompok yang lain.

#### B. SARAN-SARAN

1. Diharapkan dengan tulisan ini, mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka mempelajari dan meningkatkan studi siyasah Islam kepada para pembaca, khususnya yang berhubungan dengan masalah single majority dalam sistem politik suatu negara.
2. Dengan tulisan ini, diharapkan bisa dijadikan rujukan dan bahan komparasi bagi pemerintah dalam rangka pencarian format politik yang ideal berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang murni dan konsekwen. Sehingga tercipta kehidupan politik yang mantap dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di ridhai Allah Subhanahu Wata'ala.